

**RENCANA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kediri dalam bidang komunikasi dan informatika, telah dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2022. RENJA digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi RKPD Kabupaten Kediri tahun 2022.

Tujuan penyusunan RENJA ini adalah untuk memberikan arahan/panduan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri agar sesuai dengan perencanaan serta dapat menjadi panduan/ pedoman bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang akan dilaporkan di setiap akhir tahun dalam bentuk LKjIP dan LKPJ.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2022 ini dan untuk lebih sempurna diharapkan saran dan pendapat untuk perbaikannya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kediri, 27 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kediri



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD .....	40
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	40
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah .....	41
3.3 Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV. RENJA DAN PENDANAAN SKPD .....	45
BAB V. PENUTUP.....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RENJA SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD selama 1 (satu) tahun.

RENJA SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. RENJA SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan RENJA SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun n-1 dan mengacu RKPD tahun n.
2. Program dalam RENJA SKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun n.
3. Program dan kegiatan dalam RENJA SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam RENJA SKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri yang ke 2 yakni “Reformasi birokrasi dan pelayanan publik” maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2022. Selanjutnya RENJA SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 30).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk tahun 2022 ke depan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kediri.

Adapun maksud penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberi arah dan pedoman kepada setiap aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam menjalankan program selama tahun 2022 untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan.
2. Menjadikan rencana kerja sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri di tahun 2022.
3. Merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan atau memantau pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun 2022.

Sedangkan Tujuan Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang komunikasi informatika, persandian, dan statistik di tahun 2022 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan bersinergi baik di dalam maupun antar sektor dan sub sektor terkait.
2. Memberikan pilihan-pilihan kebijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.
3. Memasukkan program/kegiatan yang ada di RENJA ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2022.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENJA DAN PENDANAAN SKPD**

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra tahun 2020 ditampilkan pada tabel 2.1. dan 2.2.

**Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan RPJMD 2016-2021 dan Tujuan RENSTRA SKPD**

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target RPJMD	KINERJA			
				2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah kumulatif sistem informasi yang dibangun	4	14	4	14	350% dari target RPJMD Capaian total sampai tahun 2020 adalah 14 sistem aplikasi yang terbangun

Realisasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai tujuan RPJMD tahun 2016-2021 dan tujuan RENSTRA SKPD termasuk kategori berhasil. Sampai tahun 2020, sistem informasi yang dibangun Dinas Kominfo ada 14 yaitu JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), SIPGOL (Sistem Informasi Presensi Guru Online), e-surat, sms center, SIPANSER (Sistem Informasi Pemantau Jaringan dan Server, *Dashboard Integrasi CCTV*, SINAU (Sistem Informasi Manajemen Penugasan), SILAT (Sistem Informasi Manajemen Pelatihan), Website SKPD Aplikasi TI, Portal website PPID (Sistem Informasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi), SIMOTI (Sistem Informasi Manajemen Operasional TI), SIPID (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah), SILAB (Sistem Informasi Pelaporan Bandwidth), dan SINCAN Sistem Informasi Kecamatan.

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA SKPD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya SKPD yang berbasis e-Government	Persentase SKPD yang berbasis e-government	100%	100%	100%	100%
		Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi	20	21	20	95%
		Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab	510 Mbps	1 Gbps	510 Mbps	51%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Persentase desa yang membentuk KIM	57,8%	100%	57,8%	57,8%
		Persentase PPID aktif pada SKPD	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah	Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi	730/tahun	600/tahun	785/tahun	130%
		Jumlah update pada media pemerintah daerah	10 kali/hari	10 kali/per hari	10 kali/per hari	100%
		Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab ( <i>content viewer</i> )	15,6jt/tahun	20jt/tahun	18,6jt/tahun	93%

Capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 :

### 1. Meningkatnya SKPD yang berbasis e-Government

- a. Persentase SKPD yang berbasis e-Government mencapai 100%, menggambarkan seluruh SKPD sudah memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan. Dari 63 SKPD semuanya sudah memanfaatkan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Kominfo yang bekerja sama dengan dinas terkait sebagai leading sector.
- b. Jumlah ruang publik yang terlayani wifi sebanyak 20 titik, sama dengan tahun lalu, atau mencapai 95% dari yang ditargetkan di tahun 2020 sebanyak 21.
- c. Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab yang ditargetkan 1Gbps tercapai 51% yaitu 510 Mbps, sama seperti tahun 2019. Meskipun secara kinerja mencapai 51% dari target namun tingkat kecepatan ini sudah memenuhi kebutuhan layanan bandwidth dan mampu mendukung kinerja sistem informasi yang ada di Kabupaten Kediri secara keseluruhan.

### 2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik

- a. Persentase desa yang membentuk KIM mencapai 57,8%. Saat ini kegiatan KIM lebih difokuskan pada pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah ada, untuk memaksimalkan potensinya.

- b. Persentase PPID aktif pada SKPD sebesar 100%. Semua SKPD di Pemkab Kediri sudah memiliki PPID Pembantu dan berfungsi dalam layanan informasi publik. Namun permintaan informasi memang lebih banyak dilakukan masyarakat langsung ke PPID Utama yang ada di Dinas Kominfo.

**3. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik**

- a. Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi mencapai 130%. Dari yang ditargetkan 600/tahun terealisasi 785/tahun.
- b. Jumlah update pada media pemerintah daerah terealisasi sebesar 100%. Masih sama dengan tahun 2019 yaitu mencapai 10 kali per hari. Hal ini karena didukung dengan adanya media sosial seperti instagram, facebook, dan twitter yang juga aktif digunakan selain website pemerintah.
- c. Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab (*content viewer*) di tahun 2020 terealisasi 93% dari yang ditargetkan 20jt/tahun. Capaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2019, yaitu dari 15,6jt/tahun menjadi 18,6jt/tahun.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri disajikan dalam tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2016 S/D TAHUN 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2019)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target kinerja	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	- - - -									
<b>2.10 . 2.10.1 . 01</b>	<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Capaian Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.01.01	1 Penyediaan jasa surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.02	2 . Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.07	3 . Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa adminstrasi Keuangan	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.08	4 . Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.10	5 Penyediaan alat tulis kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.11	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.13	7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.14	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan peralatan rumah tangga yang diadakan	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%

2.10.01.01.15	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.17	10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat-rapat yang diselenggarakan	72 kali	36 kali	-	-	-	-	36 kali	50%
2.10.01.01.08	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	720 kali	360 kali	-	-	-	-	360 kali	50%
2.10.01.01.19	12	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	waktu penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.20	13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1440 kali	720 kali	-	-	-	-	720 kali	50%
2.10.01.01.22	14	Penyediaan Jasa Operasional	waktu penyediaan jasa operasional	72 bulan	236bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.23	15	Penyediaan jasa administrasi barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi barang	12 orang	4 org	-	-	-	-	6 org	50%
2.10.01.01.24	16	Penyedia Jasa Keamanan Kantor	waktu penyediaan jasa keamanan kantor keamanan kantor	72 bulan	12 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10 . 2.10.1 . 01 . 30	17	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Waktu pelaksanaan administrasi perkantoran	36 bulan	-	12	12	100%	12 bulan	24 bulan	66%
2.10 . 2.10.1 . 01 . 31	18	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	36 bulan	-	12	12	100%	12 bulan	24 bulan	66%
<b>2.10 . 2.10.1 . 02</b>	<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Capaian Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.02.22	1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	-	1 gedung	100%
2.10.01.02.24	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
2.10.01.02.33	3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10 . 2.10.1 . 02 . 45	4	Rehabilitasi sedang/berat tempat parkir/taman/pagar	Tempat parkir/taman/pagar yang direhap	2 paket	-	2 paket	2 paket	100%	-	-	100%
2.10 . 2.10.1 . 02 . 55	5	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Peralatan dan perlengkapan yang tersedia/terpelihara	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
<b>2.10.01.05</b>	<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase keikutsertaan aparatur dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.05.04	1	Pendidikan dan Pelatihan TUPOKSI	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.05.05	2	Akreditasi Tenaga Fungsional	Persentase tenaga fungsional yang diakreditasi	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>2.10 . 2.10.1 . 06</b>	<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.06.01	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan realisasi kinerja SKPD	6 laporan	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	33%
2.10.01.06.04	2	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir	Jumlah pelaporan keuangan akhir	6 laporan	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	33%
2.10.01.06.06	3	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan LKJIP	6 laporan	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	33%
2.10.01.06.07	4	Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	Jumlah Laporan Renja	6 laporan	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	33%
2.10.01.06.15	5	Penyusunan Rencana Strategis dan/ayau LKPJ SKPD	Jumlah Laporan Renstra	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	100%
2.10.01.06.20	6	Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi Terpadu	Persentase pelaksanaan pengembangan sistem layanan informasi terpadu	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	100%
2.10 . 2.10.1 . 06 . 21	7	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	15 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	10 dokumen	66%
<b>2.14 . 2.10.1 . 15</b>	<b>5</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>Persentase publikasi data statistik</b>	<b>100%</b>							
2.14 . 2.10.1 . 15 . 14	1	Publikasi Informasi Data Statistik Daerah	Jumlah Buku Laporan Statistik Hasil Pembangunan Daerah	3 paket buku	1 paket buku	1 paket buku	1 paket buku	100%	1 paket buku	3 paket buku	100%
2.14 . 2.10.1 . 15 . 17	2	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah laporan hasil kajian bidang informasi dan komunikasi	2 kajian	-	1 kajian	1 kajian	100%	1 kajian	2 kajian	100%
<b>2.10 . 2.10.1 . 15</b>	<b>6</b>	<b>Program pengembangan komunikasi,informasi dan media massa</b>	<b>Persentase pengembangan komunikasi ,informasi dan media massa</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.15.02	1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jaringan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.10.01.15.03	2	Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Persentase pelaksanaan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.10.01.15.06	3	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Persentase pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.10.01.15.12	4	monitoring dan evaluasi warnet	Jumlah Movey yang dilakukan	6 kali	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.15.13	5	Pembinaan dan pengembangan internet	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan internet	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
		Monitoring dan evaluasi LCKK IKM									
		Pembangunan Media Center									



		Pembangunan Data Warehouse									
		Pembangunan Hotspot									
		Upgrade P2P Pemda-Kominfo									
		Upgrade Website Pemerintah Daerah									
2.10.01.15.16	6	Pembangunan data center	Jumlah paket pengadaan Sistem Informasi Software								
2.10 . 2.10.1 . 15 . 26	7	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia teknologi informasi	Jumlah pelatihan internet dan peningkatan SDM teknologi informasi	50 kali	26 kali	20 kali	20 kali	100%	10 kali	56 kali	112%
<b>2.10.01.16</b>	<b>7</b>	<b>Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi</b>	<b>Persentase masyarakat yang memahami telecenter</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.16.01	1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Persentase pengkajian dan penelitian informasi dan komunikasi	100%	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	Pendampingan telecenter	jumlahpelaksanaan pendampingan telecenter	100%	-	-	-	-	-	-
2.10.01.16.03	3	Rekayasa Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi	Persentase pelaksanaan aplikasi sistem keamanan teknologi informasi	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.16.04	4	Rekayasa Aplikasi E-Government	Persentase rekayasa aplikasi E-Government	100%	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.10.01.16</b>	<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Persentase terpenuhinya SIMPDU Online</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.16.04	1	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase terpenuhinya SIMPDU Online	100%	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.10 . 2.10.1 . 17</b>	<b>9</b>	<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Persentase fasilitas peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>100%</b>							
2.10 . 2.10.1 . 17 . 01	1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	12 kali	6 kali	18 kali	18 kali	100%	4 kali	28 kali	230%
2.10.01.17.05	2	Sarasehan/Jumpa Pres	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	6 Kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	33,33%
2.10.01.17.09	3	Seminar situasi kondisi kebijakan pemerintah	Jumlah seminar yang diselenggarakan	6 Kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	33,33%
2.10 . 2.10.1 . 17 . 11	4	Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi	Jumlah kegiatan sinkronisasi PPID	20 kali	11 kali	19 kali	19 kali	100%	4 kali	34 kali	170%
2.10.01.17.13	5	Workshop teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 kali	-	-	-	-	-	-	-

2.10.01.17.14	6	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Teknologi Informasi	Jumlah monev yang dilakukan	144 kali	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.17.15	7	Workshop dan Sosialisasi E-Government	Jumlah workshop dan sosialisasi yang diselenggarakan	12 kali	-	-	-	-	-	-	-
	8	Study Banding									
	9	Pembinaan dan pengembangan SDM Komunikasi dan Informasi									
	10	Pelatihan SDM di Bidang Jurnalistik									
	11	Seminar penyebarluasan Informasi Program dan Hasil Pembangunan Kab.Kediri									
2.10 . 2.10.1 . 17 . 17	12	Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	Jumlah pelatihan peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	20 kali	5 kali	9 kali	9 kali	100%	5 kali	19 kali	95%
2.10 . 2.10.1 . 17 . 18	13	Penyeberluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah pertemuan Bakoimas	20 kali	5 kali	2 kali	2 kali	100%	4 kali	11 kali	55%
2.10 . 2.10.1 . 17 . 26	14	Penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri	Jumlah penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri melalui pertunjukan rakyat dan festival	100 kali	44 kali	65 kali	65 kali	100%	20 kali	129 kali	129%
<b>2.10 . 2.10.1 . 18</b>	<b>10</b>	<b>Program kerjasama informasi dengan mass media</b>	<b>Persentase kerjasama dengan Mass Media</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.18.01	1	Penyebarluasan Informasi dengan Mass Media	Keikutsertaan dalam Pameran Pekan KIM Propinsi dan Diseminasi Informasi			100%	100%	100%	100%	100%	100
2.10.01.18.14	2	Pembinaan pimpinan Radio komunikasi /swasta/niaga	Jumlah pembinaan yang dilakukan	12 kali	6 kali	-	-	-	-	6 kali	50%
2.10.01.18.15	3	Penyebarluasan informasi melalui leflet/brosur/stiker/spanduk program pemerintah	Persentase penyebarluasan informasi melalui leflet/brosur/stiker/spanduk program pemerintah	98%	100%	-	-	-	-	-	98%
	4	Penyampaian ketentuan di Bidang Cukai kepada masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau		-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.18.18	5	Persiapan Festival Pertunjukan Rakyat Pekan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	6 kali	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.18.19	6	Festival Pertunjukan Rakyat Pekan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	1 kali	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.18.20	7	sarasehan/coffe morning	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	12 kali	3 kali	-	-	-	-	-	33%
2.10.01.18.25	8	pembinaan SDM ORARI dan RAPI	Persentase pembinaan SDM ORARI dan RAPI	100%	100%	-	-	-	-	-	100%

2.10.01.18.27	9	Penyebarluasan informasi melalui media elektronik	Persenatase penyebarluasan informasi melalui media masa elektronik	98%	93%	-	-	-	-	-	98%
2.10.01.18.31	10	Pemberian informasi kepada Lembaga Non Pemerintah	Persentase pemberian informasi kepada lembaga Non Pemerintah	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.18.32	11	Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.18.33	12	Penyebarluasan Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri	Persenatase penyebarluasan informasi isu strategis di Kab.Kediri	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.18.02	13	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persenatase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.10.01.18.04	14	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Persentase penyebarluasan informasi penyuluhan bagi pemerintah daerah	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.10.01.18.05	15	Penyebarluasan informasi melalui siaran radio daerah	Persentase penyebarluasan informasi melalui siaran radio daerah	95%	100%	-	-	-	-	-	95%
2.10.01.18.06	16	Penyebarluasan informasi melalui pemutaran film	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	6 kali	3 kali	-	-	-	-	3 kali	50%
2.10.01.18.07	17	Penyebarluasan informasi melalui peliputan penerbitan majalah kominfo	Persentase penyebarluasan informasi melalui peliputan penerbitan majalah kominfo	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.10.01.18.08	18	Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah di Tingkat Kabupaten	Persentase penyebaran informasi pembangunan daerah di tingkat Kabupaten	96%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.10 . 2.10.1 . 18 . 10	19	Peliputan kegiatan pembangunan di Kab.Kediri	Jumlah acara/kegiatan pembangunan di Kabupaten Kediri yang diliput	3650	1460	730	730	100%	730	2920	80%
2.10.01.18.11	28	Pameran Teknologi Informasi	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	6 kali	3 kali	-	-	-	-	3 kali	50%
2.10 . 2.10.1 . 18 . 32	29	Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di media Cetak	180 media	135 media	80 media	90 media	112%	42 media	267 media	148%
2.10 . 2.10.1 . 18 . 34	30	Diseminasi informasi publik	Jumlah diseminasi informasi publik melalui media elektronik	120 media	45 media	55 media	55 media	100%	37 media	137 media	114%
2.10 . 2.10.1 . 18 . 35	31	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat	20	11	10	9	90%	6	26	130%
<b>2.10 . 2.10.1 . 20</b>	<b>11</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informasi</b>	<b>Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang teknologi Informasi</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.20.01	1	Layanan Jasa Bandwidth	Persentase pelaksanaan layanan jasa bandwidth	90%	90%	-	-	-	-	90%	100%
2.10 . 2.10.1 . 20 . 04	2	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Persentase pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	90%	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	100%
2.10.01.20.05	3	Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi	Persentase pengembangan aplikasi sistem keamanan teknologi Informasi	90%	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	100%

2.10.01.20.06	4	Pemeliharaan Aplikasi E-Government	Persentase pemeliharaan Aplikasi E-Government	90%	-	-	-	-	-	90%	100%
2.10.01.20.07	5	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi	Persentase pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi	90%	3 paket	-	-	-	1 paket	100%	100%
<b>2.10 . 2.10.1 . 21</b>	<b>12</b>	<b>Program Pengembangan E-Government</b>	<b>Persentase pengembangan E-Government</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.21.03	1	Pengelolaan Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan domain dan sub-domain pemerintah daerah	90%	100%	-	-	-	-	100%	100%
2.10.01.21.05	2	Monitoring dan evaluasi Sistem Informasi dan Aplikasi E-Government	Persentase monitoring dan evaluasi sistem Informasi dan Aplikasi E-Government	90%	100%	-	-	-	-	100%	100%
2.10.01.21.06	3	Pengelolaan E-Government	Persentase Pengelolaan E-Government	90%	100%	-	-	-	-	100%	100%
2.10 . 2.10.1 . 21 . 07	4	Rekayasa Aplikasi E-government	Jumlah pembangunan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4 paket	80%
2.10 . 2.10.1 . 21 . 11	5	Pengelolaan dan pemeliharaan layanan E-Government	Pembelian bandwidth dan pemeliharaan aplikasi teknologi informasi	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	100%
2.10 . 2.10.1 . 21 . 13	6	Sosialisasi sistem informasi	Jumlah sosialisasi sistem informasi	50 kali	-	28 kali	28 kali	100%	7 kali	35 kali	75%
<b>2.10.01.22</b>	<b>13</b>	<b>Program Pengembangan Data Center</b>	<b>Persentase pengembangan data center</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.22.05	1	Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Data Elektronik	Jumlah Monev yang dilakukan	144 kali	1 kali	-	-	-	-	-	-
	2	Pembangunan Data Center		100%	-	-	-	-	-	-	-

Kediri, 27 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kediri



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menetapkan 10 (sepuluh) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan pada tahun 2020. Berikut ini target dan realisasi anggaran tahun 2020.

**Tabel 2.4**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2020**

NO.	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.661.881.000</b>	<b>1.570.907.907</b>	<b>94,53</b>	<b>DAU</b>
1.	Pelaksanaan administrasi perkantoran	1.427.965.000	1.353.761.513	94,80	DAU
2.	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	233.916.000	217.146.394	92,83	DAU
<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>300.856.665</b>	<b>278.977.650</b>	<b>92,73</b>	<b>DAU</b>
1.	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	300.856.665	278.977.650	92,73	DAU
<b>C.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>19.640.000</b>	<b>4.524.300</b>	<b>23,04</b>	<b>DAU</b>
1.	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	19.640.000	4.524.300	23,04	DAU
<b>D.</b>	<b>Program pengembangan komunikasi, informasi dan Media Massa</b>	<b>120.225.000</b>	<b>120.225.000</b>	<b>100</b>	<b>Pajak Rokok</b>
1.	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia teknologi informasi	120.225.000	120.225.000	100	Pajak Rokok
<b>E.</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>184.000.000</b>	<b>177.781.500</b>	<b>96,62</b>	<b>DAU</b>
1.	Publikasi informasi data statistik daerah	64.000.000	62.490.000	97,64	DAU
2.	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	120.000.000	115.291.500	96,08	DAU
<b>F.</b>	<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>372.080.000</b>	<b>218.618.800</b>	<b>58,76</b>	<b>DAU dan Pajak Rokok</b>
1.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	38.830.000	1.400.000	16,67	DAU
2.	Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	110.830.000	72.181.000	65,13	DAU

NO.	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA
3.	Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	63.020.000	3.400.000	5,40	DAU
4.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	32.400.000	14.637.800	45,18	DAU
5.	Penyebaran Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri	127.000.000	127.000.000	100	Pajak Rokok
<b>G.</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>	<b>6.641.693.500</b>	<b>6.582.383.600</b>	<b>99,11</b>	<b>DAU dan Pajak Rokok</b>
1.	Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kab. Kediri	178.700.000	134.770.000	75,42	DAU
2.	Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.952.218.500	1.915.138.600	99,48	DAU
3.	Diseminasi informasi publik	4.480.175.000	4.474.875.000	99,88	DAU dan Pajak Rokok
4.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	57.600.000	57.600.000	100	Pajak Rokok
<b>H.</b>	<b>Program Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>500.000.000</b>	-	-	<b>Cukai</b>
1.	Penyebaran informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai dan wabah penyakit menular pada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	500.000.000	-	-	Cukai
<b>I.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi</b>	<b>1.184.000.000</b>	<b>1.078.825.007</b>	<b>91,12</b>	<b>DAU</b>
1.	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	476.000.000	453.195.000	95,21	DAU
2.	Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi	683.000.000	600.630.007	87,94	DAU
3.	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi	25.000.000	25.000.000	100	DAU
<b>J.</b>	<b>Program Pengembangan e-Government</b>	<b>2.812.373.000</b>	<b>2.747.104.500</b>	<b>97,68</b>	<b>DAU</b>
1.	Rekayasa Aplikasi e-government	1.000.000	-	0	DAU
2.	Pengelolaan dan pemeliharaan layanan e-Government	2.804.598.000	2.740.329.500	97,71	DAU
3.	Sosialisasi sistem informasi	6.775.000	6.775.000	100	DAU
	<b>TOTAL</b>	<b>13.796.749.165</b>	<b>12.779.348.264</b>	<b>92,63</b>	<b>DAU, Pajak Rokok dan Cukai</b>

**Tabel 2.5**  
**Realisasi Outcome Program/Output Kegiatan Dinas Kominfo**  
**Tahun 2020**

NO.	KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>96%</b>	<b>95%</b>	<b>98%</b>
1.	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	100%
2.	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Cakupan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	12 bln	12 bln	100%
<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presentase penanganan sarana prasarana aparatur yang memerlukan pemeliharaan</b>	<b>96%</b>	<b>95%</b>	<b>98%</b>
1.	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	1 paket	1 paket	100%
<b>C.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100%
<b>D.</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Persentase pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
1.	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia teknologi informasi	Jumlah pelatihan internet dan peningkatan SDM Teknologi Informasi	10 kegiatan	3 kegiatan	30%
<b>E.</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>Persentase publikasi data statistik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.	Publikasi Informasi Data Statistik Daerah	Jumlah Buku Laporan Statistik Hasil Pembangunan Daerah	1 buku statistik	1 buku statistik	100%
2.	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah laporan hasil kajian bidang informasi dan komunikasi	1 laporan kajian	1 laporan kajian	100%
<b>F.</b>	<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Persentase fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>	<b>95%</b>	<b>75%</b>	<b>78%</b>
1.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	1 kegiatan	0 kegiatan	0%
2.	Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Jumlah kegiatan sinkronisasi PPID	3 kegiatan	2 kegiatan	66%

NO.	KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	Jumlah pelatihan peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	2 kegiatan	0 kegiatan	0%
4.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Bakoimas	1 kegiatan	0 kegiatan	0%
5.	Penyebaran Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri	Jumlah penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri melalui pertunjukan rakyat dan festival	20 kegiatan	4 kegiatan	20%
<b>G.</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>	<b>Persentase kerjasama dengan mass media</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>
1.	Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kab. Kediri	Jumlah acara/kegiatan pembangunan di Kabupaten Kediri yang diliput	730 liputan	785 liputan	107%
2.	Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di media Cetak	42 media cetak	32 media cetak	76%
3.	Diseminasi informasi publik	Jumlah diseminasi informasi publik melalui media elektronik	37 media elektronik dan online	45 media elektronik dan online	121%
4.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi terhadap Kelompok Informasi Masyarakat	6 kegiatan	1 kegiatan	16%
<b>H.</b>	<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>Prosentase peningkatan sosialisasi ketentuan cukai dan wabah menular</b>	<b>80%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.	Penyebaran informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan wabah penyakit menular kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Jumlah Sosialisasi Cukai dan wabah menular	9 bulan	0 bulan	0%
<b>I.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi</b>	<b>Prosentase peningkatan Sarana Prasarana Bidang Teknologi Informasi</b>	<b>89%</b>	<b>90%</b>	<b>101%</b>
1.	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang dipelihara	8 paket	7 paket	87,5%
2.	Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi	Pengamanan fasilitas teknologi informasi	1 paket	1 paket	100%
3.	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi	Jumlah Infrastruktur TI yang terbangun	1 paket	1 paket	100%
<b>J.</b>	<b>Program Pengembangan e-Government</b>	<b>Prosentase pengembangan E-Government</b>	<b>89%</b>	<b>90%</b>	<b>101%</b>



NO.	KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Rekayasa Aplikasi e-government	Jumlah pembangunan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi	1 paket	0 paket	0%
2.	Pengelolaan dan pemeliharaan layanan e-Government	Pembelian bandwidth dan pemeliharaan aplikasi teknologi informasi	12 bulan	12 bulan	100%
3.	Sosialisasi sistem informasi	Jumlah sosialisasi sistem informasi	6 kegiatan	0 kegiatan	0%

Dari data pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Kediri tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo secara umum relatif sesuai dengan target, sasaran, tujuan, jadwal dan penganggaran yang direncanakan.
2. Kinerja Dinas Kominfo ditinjau dari aspek realisasi anggaran sudah mencapai 89,11% yang menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sampai bulan Desember 2020 sudah cukup efektif.
3. Ditinjau dari aspek pelaksanaan kegiatan, hampir semua kegiatan dari seluruh program yang ada sudah dapat dilaksanakan dengan baik meskipun dalam situasi pandemi Covid 19 beberapa kegiatan seperti pelatihan atau sosialisasi belum bisa dilaksanakan.
4. Pencapaian indikator kinerja sasaran baik sasaran Pemerintah Kabupaten Kediri maupun sasaran kinerja Dinas Kominfo relatif stabil dan beberapa mengalami peningkatan.
5. Ditinjau dari aspek keorganisasian Dinas Komunikasi dan Informatika meskipun telah cukup efektif dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan sumberdaya yang tersedia cukup baik dari sisi ketersediaan anggaran, sumber daya sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang ada.

Secara umum, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kediri**

NO	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	I K K	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Web site milik pemerintah daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	www.kedirikab.go.id
2	% Ketersediaan Infrastruktur jaringan			2 Jaringan	2 Jaringan	2 Jaringan	2 Jaringan	2 Jaringan	2 Jaringan	2 Jaringan	2 Jaringan	-
3	% Ketersediaan sistem Informasi (aplikasi)			4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	12 Aplikasi	14 Aplikasi	14 Aplikasi	14 aplikasi	Melebihi target RPJMD
4	% Ketersediaan Data Induk di Bidang TIK			0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	% Kecukupan SDM di bidang TIK			7 orang	8 orang	10 orang	20 orang	10 Orang	20 orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang dibutuhkan
6	% Jumlah Titik koneksi yang terhubung dengan jaringan Internet			100 titik koneksi	100 titik koneksi	100 titik koneksi	100 titik koneksi	100 titik koneksi	100 titik koneksi	120 titik koneksi	120 titik koneksi	120 yang dibutuhkan
7	Jumlah surat kabar nasional/lokal			7 buah	7 buah	7 buah	7 buah	7 buah	7 buah	7 buah	7 buah	Masih sama
8	% Penyebaran informasi, komunikasi dan media massa melalui kerjasama			68 kerjasama	70 kerjasama	75 kerjasama	75 kerjasama	65 kerjasama	75 kerjasama	75 kerjasama	80 kerjasama	

9	% Penyebaran informasi, komunikasi dan media massa melalui media milik pemerintah.			2 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	2 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	2 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	2 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	2 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	5 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	5 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	5 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	Meningkat dengan bertambahnya media seperti media sosial youtube, FB, Instagram dan juga TV streaming Kediri Lagi TV
---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Kediri, 27 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kediri



**KRISNA SETIAWAN, S.AP, M.SI**

Pembina/IVa

NIP. 19840127 200604 1 005

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) merupakan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan di bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan pemetaan misi di Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2021-2026, salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Kediri adalah “Reformasi dan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan”.

Reformasi tata kelola pemerintahan dapat diartikan sebagai upaya pembaharuan dan perubahan yang mendasar dalam tata kelola pemerintahan serta sistem penyelenggaraannya. Tujuan reformasi tersebut adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan akan menyingkirkan ego sektoral setiap pihak sehingga terwujud kolaborasi kerja lintas OPD dalam mencapai tujuan dari pembangunan. Perubahan global yang saat ini terjadi menuntut transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih cepat dan efisien. Seiring dengan pesatnya laju perkembangan teknologi, tata kelola pemerintahan dituntut untuk segera berbenah dengan berbagai layanan digital. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dinas Kominfo merupakan OPD yang mengemban misi ke-2 “Reformasi birokrasi dan pelayanan publik” maka Dinas Kominfo memiliki peran penting dalam menghadapi isu strategis Kabupaten Kediri tersebut. Isu Reformasi dan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Kediri, diantaranya :

1. Perlunya percepatan implementasi Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
2. Perlunya pemutakhiran infrastruktur IT
3. Layanan informasi dan pengaduan publik

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kediri, Dinas Kominfo memiliki peran strategis antara lain sebagai berikut :

- 1) Dinas Kominfo memiliki tugas pokok dan fungsi membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi Kabupaten Kediri. Dinas Kominfo berperan penting dalam pembangunan Kabupaten Kediri sebagai smart city melalui layanan publik

berbasis online dan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

- 2) Dinas Kominfo berperan penting dalam diseminasi informasi dan publikasi, tidak hanya melalui media massa, media offline tetapi juga media online berbasis internet seperti mempublikasikan informasi – informasi publik melalui website, media sosial.
- 3) Dinas Kominfo menjalankan fungsi – fungsi Pemberdayaan Mass Media, Penerbitan dan Informasi Mobile sehingga memiliki pengaruh kuat dalam menyebarluaskan informasi pembangunan melalui media – media massa tersebut.
- 4) Dinas Kominfo menjalankan fungsi Pemberdayaan Informasi Masyarakat melalui media – media Bakoinmas, Pertunjukan Rakyat, Siaran Radio, dan Pemutaran Film. Melalui media – media itu, Dinas Kominfo dapat menyebarluaskan berbagai informasi pembangunan dan pemerintahan kepada elemen – elemen masyarakat hingga ke desa – desa.
- 5) Sesuai dengan Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik, Dinas Kominfo menjadi sekretaris dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan RKPD. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Tahun 2022 seperti ditampilkan dalam Tabel 2.7.

**Tabel 2.7**  
**Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Kediri**

**Nama Perangkat : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri**

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Ds. Doko, Ngasem	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	8.136.902.800	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Ds. Doko, Ngasem	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	8.136.902.800	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	4.602.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	4.602.000	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	3 dokumen	3.571.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	3 dokumen	3.571.000	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun	1 dokumen	1.031.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun	1 dokumen	1.031.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	20 dokumen	7.177.968.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	20 dokumen	7.177.968.800	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah ASN yang diterimakan gaji dan tunjangan ASN	44 OB	5.649.844.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah ASN yang diterimakan gaji dan tunjangan ASN	44 OB	5.649.844.800	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah tenaga kontrak yang menerima honor	34 OB	1.076.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah tenaga kontrak yang menerima honor	34 OB	1.076.400.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah penanggungjawab pengelola keuangan yang menerima honor	24 OB	448.360.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah penanggungjawab pengelola keuangan yang menerima honor	24 OB	448.360.000	
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	1.522.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	1.522.000	
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	14 dokumen	1.344.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	14 dokumen	1.344.000	
f	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun	2 dokumen	498.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun	2 dokumen	498.000	
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>118.200.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>118.200.000</b>	
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah barang milik daerah yang dijaminakan keamanannya dengan asuransi	2 unit	105.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah barang milik daerah yang dijaminakan keamanannya dengan asuransi	2 unit	105.000.000	
b	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pengelola administrasi barang yang menerima honor	2 OB	13.200.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pengelola administrasi barang yang menerima honor	2 OB	13.200.000	
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah dokumen administrasi umum</b>	<b>30 dokumen</b>	<b>284.882.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah dokumen administrasi umum</b>	<b>30 dokumen</b>	<b>284.882.000</b>	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen penyediaan komponen listrik	4 dokumen	6.096.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen penyediaan komponen listrik	4 dokumen	6.096.000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 dokumen	43.774.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 dokumen	43.774.000	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen penyediaan peralatan rumah tangga	4 dokumen	17.548.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen penyediaan peralatan rumah tangga	4 dokumen	17.548.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen penyediaan bahan logistik kantor	4 dokumen	33.941.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen penyediaan bahan logistik kantor	4 dokumen	33.941.000	
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 dokumen	36.773.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 dokumen	36.773.000	
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 dokumen	23.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 dokumen	23.000.000	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 kegiatan	123.750.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 kegiatan	123.750.000	
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kendaraan dinas yang disewa	0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kendaraan dinas yang disewa	0	0	
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>416.280.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>416.280.000</b>	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pengadministrasi tata usaha yang menerima honor	1 OB	2.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pengadministrasi tata usaha yang menerima honor	1 OB	2.400.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	12 bulan	413.880.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	12 bulan	413.880.000	
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara baik</b>	<b>30 unit</b>	<b>134.970.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara baik</b>	<b>30 unit</b>	<b>134.970.000</b>	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara baik	14 unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara baik	14 unit	60.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara baik	16 unit	74.970.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara baik	16 unit	74.970.000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>100%</b>	<b>5.089.227.830</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>100%</b>	<b>5.089.227.830</b>	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah informasi yang dikelola</b>	<b>850 konten</b>	<b>5.089.227.830</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah informasi yang dikelola</b>	<b>850 konten</b>	<b>5.089.227.830</b>	
a	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60 orang	46.335.600	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60 orang	46.335.600	
b	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Da	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	80 orang	44.496.500	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Da	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	80 orang	44.496.500	
c	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah konten yang dikelola	850 konten	85.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah konten yang dikelola	850 konten	85.000.000	
d	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat dan jaringan komunikasi	6 kegiatan	84.934.200	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat dan jaringan komunikasi	6 kegiatan	84.934.200	
e	Pelayanan Informasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kerja sama dengan media elektronik dan portal online	40 media	2.464.464.715	Pelayanan Informasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kerja sama dengan media elektronik dan portal online	40 media	2.464.464.715	
f	Layanan Hubungan Media	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kerja sama dengan media cetak	45 media cetak	2.230.354.715	Layanan Hubungan Media	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kerja sama dengan media cetak	45 media cetak	2.230.354.715	
g	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta pelatihan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	80 orang	42.687.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta pelatihan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	80 orang	42.687.000	
h	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta pelatihan SDM dan Sinkronisasi PPID	170 orang	57.408.400	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta pelatihan SDM dan Sinkronisasi PPID	170 orang	57.408.400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
i	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta Bakoinmas	130 orang	33.546.700	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta Bakoinmas	130 orang	33.546.700	
III	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.454.331.600</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.454.331.600</b>	
1	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah yang terkelola</b>	<b>150 domain/sub domain</b>	<b>59.600.000</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah yang terkelola</b>	<b>150 domain/sub domain</b>	<b>59.600.000</b>	
a	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang terdaftar	150 domain/sub domain	4.700.000	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang terdaftar	150 domain/sub domain	4.700.000	
b	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang terpelihara	100 domain/sub domain	54.900.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang terpelihara	100 domain/sub domain	54.900.000	
2	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang terkelola</b>	<b>170 sistem informasi</b>	<b>4.394.731.600</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang terkelola</b>	<b>170 sistem informasi</b>	<b>4.394.731.600</b>	
a.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Uptime layanan Pusat Data untuk SKPD Kabupaten Kediri	95%	3.150.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Uptime layanan Pusat Data untuk SKPD Kabupaten Kediri	95%	3.150.000.000	
b	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah virtual meeting yang menggunakan fasilitas jaringan intra pemerintah	125 kegiatan vidcon	38.250.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah virtual meeting yang menggunakan fasilitas jaringan intra pemerintah	125 kegiatan vidcon	38.250.000	
c	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah aplikasi yang dibuat dan jumlah aplikasi yang dikembangkan	10 aplikasi	310.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah aplikasi yang dibuat dan jumlah aplikasi yang dikembangkan	10 aplikasi	310.000.000	
d	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Ds. Doko, Ngasem	Prosentase aplikasi terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri	15%	100.000.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Ds. Doko, Ngasem	Prosentase aplikasi terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri	15%	100.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah aparatur/masyarakat yang mengikuti pelatihan TI	70 aparatur, 80 masyarakat	75.539.600	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah aparatur/masyarakat yang mengikuti pelatihan TI	70 aparatur, 80 masyarakat	75.539.600	
f	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang terpelihara baik	6 paket	422.942.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang terpelihara baik	6 paket	422.942.000	
g	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen arsitektur SPBE	1 paket	177.750.000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen arsitektur SPBE	1 paket	177.750.000	
h	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Kediri	1 kegiatan	120.250.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Kediri	1 kegiatan	120.250.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>											
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah</b>	<b>Ada</b>	<b>239.000.001</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah</b>	<b>Ada</b>	<b>239.000.001</b>	
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah</b>	<b>1 paket data statistik sektoral</b>	<b>239.000.001</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah</b>	<b>1 paket data statistik sektoral</b>	<b>239.000.001</b>	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 kegiatan	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 kegiatan	150.000.000	
b	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah koordinasi perihal membangun metadata statistik sektoral	2 kegiatan	89.000.001	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah koordinasi perihal membangun metadata statistik sektoral	2 kegiatan	89.000.001	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>											
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Keamanan persandian dan TI</b>	<b>100%</b>	<b>569.651.900</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Keamanan persandian dan TI</b>	<b>100%</b>	<b>569.651.900</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman	1 paket	569.651.900	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman	1 paket	569.651.900	
a	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang aman	1 paket	569.651.900	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang aman	1 paket	569.651.900	
<b>TOTAL</b>					<b>18.489.114.131</b>					<b>18.489.114.131</b>	

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kediri**KRISNA SETIAWAN, S.AP, M.Si**  
Pembina/IVa

NIP. 19840127 200604 1 005

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan program menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2022 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Kajian usulan program dan kegiatan berasal dari usulan para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Pengumpulan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dilakukan dengan menghimpun usulan di acara Musrenbang dan usulan dari pihak-pihak terkait lainnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan melalui penjaringan aspirasi masyarakat disajikan dalam tabel 2.8.

Tabel 2.8

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Kediri**

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>4 dokumen</b>	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	3 dokumen	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun	1 dokumen	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia</b>	<b>20 dokumen</b>	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah ASN yang diterimakan gaji dan tunjangan ASN	44 OB	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah tenaga kontrak yang menerima honor	34 OB	
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah penanggungjawab pengelola keuangan yang menerima honor	24 OB	
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	14 dokumen	
f	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun	2 dokumen	
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>2 dokumen</b>	
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah barang milik daerah yang dijamin keamanannya dengan asuransi	2 unit	
b	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pengelola administrasi barang yang menerima honor	2 OB	

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen administrasi umum	30 dokumen	
1	2	3	4	5	6
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen penyediaan komponen listrik	4 dokumen	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 dokumen	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen penyediaan peralatan rumah tangga	4 dokumen	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen penyediaan bahan logistik kantor	4 dokumen	
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 dokumen	
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 dokumen	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 kegiatan	
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah</b>	<b>0</b>	
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kendaraan dinas yang disewa	0	
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>12 bulan</b>	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pengadministrasi tata usaha yang menerima honor	1 OB	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	12 bulan	
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara baik</b>	<b>30 unit</b>	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara baik	14 unit	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara baik	16 unit	
<b>II</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>100%</b>	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>Jumlah informasi yang terkelola</b>	<b>850 konten</b>	



a	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60 orang	
1	2	3	4	5	6
b	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	80 orang	
c	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah konten yang dikelola	850 konten	
d	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat dan jaringan komunikasi	6 kegiatan	
e	Pelayanan Informasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kerja sama dengan media elektronik dan portal online	40 media	
f	Layanan Hubungan Media	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kerja sama dengan media cetak	45 media cetak	
g	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta pelatihan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	80 orang	
h	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta pelatihan SDM dan Sinkronisasi PPID	170 orang	
i	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah peserta Bakoinmas	130 orang	
<b>III</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah yang dikelola</b>	<b>150 domain/sub domain</b>	
a	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang terdaftar	150 domain/sub domain	
b	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang terpelihara	100 domain/sub domain	
<b>2</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang dikelola</b>	<b>170 sistem informasi</b>	
a.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Uptime layanan Pusat Data untuk SKPD Kabupaten Kediri	95%	
b	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah virtual meeting yang menggunakan fasilitas jaringan intra pemerintah	125 kegiatan vidcon	
c	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah aplikasi yang dibuat dan jumlah aplikasi yang dikembangkan	10 aplikasi	

d	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Ds. Doko, Ngasem	Prosentase aplikasi terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri	15%	
1	2	3	4	5	6
e	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah aparatur/masyarakat yang mengikuti pelatihan TI	70 aparatur, 80 masyarakat	
f	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang terpelihara baik	6 paket	
g	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen arsitektur SPBE	1 paket	
h	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Kediri	1 kegiatan	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah</b>	<b>Ada</b>	
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah</b>	<b>1 paket data statistik sektoral</b>	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 kegiatan	
b	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah koordinasi perihal membangun metadata statistik sektoral	2 kegiatan	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Keamanan persandian dan TI</b>	<b>100%</b>	
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman</b>	<b>1 paket</b>	
a	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang aman	1 paket	

Kediri, 27 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kediri

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN SKPD

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan lintas instansi, diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Selaras dengan RPJPN 2005-2025 serta visi misi Presiden, pembangunan Kabupaten Kediri dalam RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah Pemantapan ketertiban, keamanan, dan ketentraman serta terciptanya iklim inovasi daya saing daerah. Fokus

pembangunan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang selaras dengan kebijakan nasional dan menjadi tugas dari Dinas Kominfo adalah “Digitalisasi Birokrasi, Informasi dan Layanan Publik” dengan strategi arah kebijakan :

1. Penyiapan *roadmap* dan *masterplan* digitalisasi birokrasi, informasi dan layanan public
2. Pengembangan *e-governmen*
3. Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik
4. Pengembangan Smart-Pertanian melalui program Desa Inovasi Tani Organik (DITO)
5. Pengembangan ekonomi digital (*e-commerce*)
6. Menyediakan pelayanan cerdas menggunakan Teknologi Informasi berbasis Big Data, Artificial Intelligence, Robotics, Cloud Computing sehingga masyarakat bisa melayani dirinya sendiri dari rumah
7. Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu big data
8. Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika
9. Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya
10. Penguatan komunikasi informasi publik melalui media sosial, media tatap muka, dan radio
11. Pengembangan komunikasi tematik melalui program NGOPI
12. Kerjasama dan penguatan jejaring komunikasi media masa, komunitas dan kelompok informasi masyarakat

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **3.2.1 Tujuan**

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri mengemban Visi Bupati Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani”, dan menjalankan misi Bupati Kediri yang ke 2 yakni “Reformasi birokrasi dan pelayanan publik”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Kediri adalah “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan tujuan Dinas Kominfo adalah sasaran Kabupaten Kediri dalam Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yaitu “Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks SPBE .

### 3.2.2 Sasaran

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Kominfo sebagai berikut : “Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik” dengan indikator Indeks kategori PPID.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kediri termasuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, maka langkah-langkah operasional strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dituangkan ke dalam program-program komunikasi dan informasi serta program statistik yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Program tersebut berisi satu atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2022 yaitu sebanyak 5 program, 12 kegiatan dan 44 sub kegiatan sebagai berikut :

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

##### 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

##### 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

##### 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

**7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**II. Program Informasi Dan Komunikasi Publik**

**1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- b. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- c. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- d. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- e. Pelayanan Informasi Publik
- f. Layanan Hubungan Media
- g. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
- h. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

### **III. Program Aplikasi Informatika**

#### **1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

#### **2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- b. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah daerah
- c. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- d. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- e. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- f. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- g. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

### **IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

#### **1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- b. Membangun Metadata Statistik Sektoral

### **V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

#### **1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2022 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kediri mendukung program prioritas Kabupaten Kediri dan juga sebagai aktivitas dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Kediri yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.

Mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, jumlah biaya/dana indikatif yang akan diserap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebesar Rp. 18.489.114.131,00 dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022  
dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Kediri**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
2.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Ds. Doko, Ngasem	100%	8.136.902.800			100%	8.162.914.800
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Ds. Doko, Ngasem	4 dokumen	4.602.000	DAU		4 dokumen	4.966.000
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Ds. Doko, Ngasem	3 dokumen	3.571.000	DAU		3 dokumen	3.874.000
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun	Ds. Doko, Ngasem	1 dokumen	1.031.000	DAU		1 dokumen	1.092.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>20 dokumen</b>	<b>7.177.968.800</b>	<b>DAU</b>		<b>20 dokumen</b>	<b>7.178.136.800</b>
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diterimakan gaji dan tunjangan ASN	Ds. Doko, Ngasem	44 OB	5.649.844.800	DAU		44 OB	5.649.844.800
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga kontrak yang menerima honor	Ds. Doko, Ngasem	34 OB	1.076.400.000	DAU		34 OB	1.076.400.000
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah penanggungjawab pengelola keuangan yang menerima honor	Ds. Doko, Ngasem	24 OB	448.360.000	DAU		24 OB	448.360.000
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Ds. Doko, Ngasem	1 dokumen	1.522.000	DAU		1 dokumen	1.598.000
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran yang tersusun	Ds. Doko, Ngasem	14 dokumen	1.344.000	DAU		14 dokumen	1.411.000
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun	Ds. Doko, Ngasem	2 dokumen	498.000	DAU		2 dokumen	523.000
<b>2.16.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>118.200.000</b>	<b>DAU</b>		<b>2 dokumen</b>	<b>123.200.000</b>
2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dijaminan keamanannya dengan asuransi	Ds. Doko, Ngasem	2 unit	105.000.000	DAU		2 unit	110.000.000
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengelola administrasi barang yang menerima honor	Ds. Doko, Ngasem	2 OB	13.200.000	DAU		2 OB	13.200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi umum</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>30 dokumen</b>	<b>284.882.000</b>	<b>DAU</b>		<b>30 dokumen</b>	<b>297.928.000</b>
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen penyediaan komponen listrik	Ds. Doko, Ngasem	4 dokumen	6.096.000	DAU		4 dokumen	6.400.000
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Ds. Doko, Ngasem	4 dokumen	43.774.000	DAU		4 dokumen	45.963.000
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dokumen penyediaan peralatan rumah tangga	Ds. Doko, Ngasem	4 dokumen	17.548.000	DAU		4 dokumen	18.366.000
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dokumen penyediaan bahan logistik kantor	Ds. Doko, Ngasem	4 dokumen	33.941.000	DAU		4 dokumen	35.638.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen penyediaan barang cetak dan penggandaan	Ds. Doko, Ngasem	4 dokumen	36.773.000	DAU		4 dokumen	38.611.000
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ds. Doko, Ngasem	4 dokumen	23.000.000	DAU		4 dokumen	24.000.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Ds. Doko, Ngasem	20 kegiatan	123.750.000	DAU		20 kegiatan	128.950.000
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DAU</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.16.01.2.07.01</b>	<b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>Jumlah kendaraan dinas yang disewa</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DAU</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>12 bulan</b>	<b>416.280.000</b>	<b>DAU</b>		<b>12 bulan</b>	<b>436.970.000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadministrasi tata usaha yang menerima honor	Ds. Doko, Ngasem	1 OB	2.400.000	DAU		1 OB	2.400.000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	Ds. Doko, Ngasem	12 bulan	413.880.000	DAU		12 bulan	434.570.000
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara baik</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>30 unit</b>	<b>134.970.000</b>	DAU		<b>30 unit</b>	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara baik	Ds. Doko, Ngasem	14 unit	60.000.000	DAU		14 unit	42.996.000
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara baik	Ds. Doko, Ngasem	16 unit	74.970.000	DAU		16 unit	78.718.000
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>100%</b>	<b>5.089.227.830</b>	<b>DAU dan Pajak Rokok</b>		<b>100%</b>	<b>6.605.677.000</b>
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah informasi yang dikelola</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>850 konten</b>	<b>5.089.227.830</b>	<b>DAU dan Pajak Rokok</b>		<b>850 konten</b>	<b>6.605.677.000</b>
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah peserta Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	60 orang	46.335.600	DAU		60 orang	46.706.800
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	80 orang	44.496.500	DAU		80 orang	<b>45.616.400</b>
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang dikelola	Ds. Doko, Ngasem	850 konten	85.000.000	DAU		850 konten	<b>85.000.000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat dan jaringan komunikasi	Ds. Doko, Ngasem	6 kegiatan	84.934.200	DAU		6 kegiatan	613.020.900
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kerja sama dengan media elektronik dan portal online	Ds. Doko, Ngasem	40 media	2.464.464.715	DAU		40 media	2.635.749.500
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerja sama dengan media cetak	Ds. Doko, Ngasem	45 media cetak	2.230.354.715	Pajak Rokok		45 media cetak	3.042.778.700
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah peserta pelatihan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Ds. Doko, Ngasem	80 orang	42.687.000	DAU		80 orang	43.828.300
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah peserta pelatihan SDM dan Sinkronisasi PPID	Ds. Doko, Ngasem	170 orang	57.408.400	DAU		170 orang	58.225.700
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah peserta Bakoinmas	Ds. Doko, Ngasem	130 orang	33.546.700	DAU		130 orang	34.750.700
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>100%</b>	<b>4.454.331.600</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>5.129.618.000</b>
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah yang terkelola</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>150 domain/sub domain</b>	<b>59.600.000</b>	<b>DAU</b>		<b>150 domain/sub domain</b>	<b>68.305.000</b>
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang terdaftar	Ds. Doko, Ngasem	150 domain/sub domain	4.700.000	DAU		150 domain/sub domain	5.170.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang terpelihara	Ds. Doko, Ngasem	100 domain/sub domain	54.900.000	DAU		100 domain/sub domain	63.135.000
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang dikelola</b>	<b>Ds. Doko, Ngasem</b>	<b>170 sistem informasi</b>	<b>4.394.731.600</b>	<b>DAU</b>		<b>170 sistem informasi</b>	<b>5.061.313.000</b>
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Uptime layanan Pusat Data untuk SKPD Kabupaten Kediri	Ds. Doko, Ngasem	95%	3.150.000.000	DAU		95%	3.520.000.000
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah virtual meeting yang menggunakan fasilitas jaringan intra pemerintah	Ds. Doko, Ngasem	125 kegiatan vidcon	38.250.000	DAU		125 kegiatan vidcon	88.250.000
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dibuat dan jumlah aplikasi yang dikembangkan	Ds. Doko, Ngasem	10 aplikasi	310.000.000	DAU		10 aplikasi	341.000.000
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Prosentase aplikasi terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri	Ds. Doko, Ngasem	15%	100.000.000	DAU		15%	152.790.000
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aparatur/masyarakat yang mengikuti pelatihan TI	Ds. Doko, Ngasem	70 aparatur, 80 masyarakat	75.539.600	DAU		70 aparatur, 80 masyarakat	78.331.000
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang terpelihara baik	Ds. Doko, Ngasem	6 paket	422.942.000	DAU		6 paket	562.942.000
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah dokumen arsitektur SPBE	Ds. Doko, Ngasem	1 paket	177.750.000	DAU		1 paket	187.750.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Kediri	Ds. Doko, Ngasem	1 kegiatan	120.250.000	DAU		1 kegiatan	130.250.000
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>								
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>Ada</b>	<b>239.000.001</b>	DAU		<b>Ada</b>	<b>201.152.900</b>
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>1 paket data statistik sektoral</b>	<b>239.000.001</b>	DAU		<b>1 paket data statistik sektoral</b>	<b>201.152.900</b>
2.20.02.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Ds. Doko, Ngasem	1 kegiatan	150.000.000	DAU		1 kegiatan	106.147.300
2.20.02.2.01	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi perihal membangun metadata statistik sektoral	Ds. Doko, Ngasem	2 kegiatan	89.000.001	DAU		2 kegiatan	95.005.600
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>								
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Keamanan persandian dan TI</b>	Ds. Doko, Ngasem	<b>100%</b>	<b>569.651.900</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>602.369.000</b>
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman	Ds. Doko, Ngasem	1 paket	569.651.900	DAU		1 paket	602.369.000

2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang aman	Ds. Doko, Ngasem	1 paket	569.651.900	DAU		1 paket	602.369.000
	<b>Total</b>				<b>18.489.114.131</b>				<b>20.701.731.700</b>

Mengetahui,

  
**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kediri**  
**KRISNA SETIAWAN, S.AP, M.Si**  
 Pembina/IVa  
 NIP. 19840127 200604 1 005



## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2022 yang telah di-*input* ke dalam aplikasi SIPD ditampilkan dalam tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Belanja
1	2	3	4
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan</b>	<b>8.136.902.800</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>4.602.000</b>
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	3.571.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun	1.031.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia</b>	<b>7.177.968.800</b>
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diterima gaji dan tunjangan ASN	5.649.844.800
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga kontrak yang menerima honor	1.076.400.000
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah penanggungjawab pengelola keuangan yang menerima honor	448.360.000
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1.522.000
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	1.344.000
f	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun	498.000
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>118.200.000</b>
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dijamin keamanannya dengan asuransi	105.000.000

1	2	3	4
b	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengelola administrasi barang yang menerima honor	13.200.000
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi umum</b>	<b>284.882.000</b>
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen penyediaan komponen listrik	6.096.000
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	43.774.000
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dokumen penyediaan peralatan rumah tangga	17.548.000
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dokumen penyediaan bahan logistik kantor	33.941.000
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.773.000
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	23.000.000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	123.750.000
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah</b>	<b>0</b>
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disewa	0
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>416.280.000</b>
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadministrasi tata usaha yang menerima honor	2.400.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	413.880.000
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara baik</b>	<b>134.970.000</b>
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara baik	60.000.000
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara baik	74.970.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>5.089.227.830</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah informasi yang terkelola</b>	<b>5.089.227.830</b>
a	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah peserta Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	46.335.600
b	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	44.496.500
c	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang dikelola	85.000.000
d	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat dan jaringan komunikasi	84.934.200

1	2	3	4
e	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kerja sama dengan media elektronik dan portal online	2.464.464.715
f	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerja sama dengan media cetak	2.230.354.715
g	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah peserta pelatihan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	42.687.000
h	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah peserta pelatihan SDM dan Sinkronisasi PPID	57.408.400
i	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah peserta Bakoinmas	33.546.700
<b>III</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah</b>	<b>4.454.331.600</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah yang terkelola</b>	<b>59.600.000</b>
a	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang terdaftar	4.700.000
b	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang terpelihara	54.900.000
<b>2</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang terkelola</b>	<b>4.394.731.600</b>
a.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Uptime layanan Pusat Data untuk SKPD Kabupaten Kediri	3.150.000.000
b	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah virtual meeting yang menggunakan fasilitas jaringan intra pemerintah	38.250.000
c	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dibuat dan jumlah aplikasi yang dikembangkan	310.000.000
d	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Prosentase aplikasi terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri	100.000.000
e	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aparatur/masyarakat yang mengikuti pelatihan TI	75.539.600
f	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang terpelihara baik	422.942.000
g	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah dokumen arsitektur SPBE	177.750.000
h	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Kediri	120.250.000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>			
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah</b>	<b>239.000.001</b>

1	2	3	4
1	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah</b>	<b>239.000.001</b>
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	150.000.000
b	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi perihal membangun metadata statistik sektoral	89.000.001
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Keamanan persandian dan TI</b>	<b>569.651.900</b>
1	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman</b>	<b>569.651.900</b>
a	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang aman	<b>569.651.900</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>18.489.114.131</b>

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, dan program pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022. Rencana Kerja 2022 ini akan dijadikan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 yang akuntabel, terukur, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*) yang optimal. Dalam penyusunan dokumen ini tentunya berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri 2021-2026.

Diharapkan dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Kediri, 27 Agustus 2021



BUPATI KEDIRI

**HANINDHITO HIMAWAN**  
**PRAMANA**